



Buat Aplikasi untuk Skrining Wisatawan

■ Sultan Minta Pemerintah Izinkan Pemda DIY Terbitkan QR Code

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memutuskan untuk mengembangkan aplikasi sendiri untuk skrining wisatawan yang masuk kawasan Malioboro. Hal tersebut dilakukan, karena QR Code aplikasi Peduli Lindungi yang sejauh ini tak kunjung didapat.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, Malioboro memang tidak masuk daftar destinasi wisata yang dizinkan beroperasi oleh Kemenparekraf RI. Namun, sebagai kawasan ekonomi, Malioboro kini sudah ramai kunjungan, khususnya sejak tingkat PPKM turun ke level 3.

"Sekarang kita lihat, sudah banyak orang datang ke sana. Jadi, mau tidak mau ya, kita harus memonitor, meski dengan aplikasi sendiri," katanya, Rabu (29/9).

Walaupun begitu, Heroe bisa memahami, bahwa Kemenkes RI punya prosedur tersendiri untuk memberikan QR Code pada objek wisata tertentu. Terlebih, mereka yang mengajukan pun jumlahnya tak sedikit, sehingga butuh waktu yang panjang untuk menurunkannya ke daerah.

"Ya, karena saya bayangkan, seluruh Indonesia mengajukan semuanya. Lagipula, QR Code itu spesifik, jadi perlu waktu panjang. Makanya, kita pakai model aplikasi sendiri, kita monitor mereka yang datang," ungkapnya.

Ia menjelaskan, aplikasi tersebut semula diberi nama 'Sowan Jogja', namun bakal diganti karena pertimbangan tertentu. Menurutnya,

- MONITOR PENGUNJUNG**
- Pemkot kembangkan aplikasi sendiri untuk skrining wisatawan Malioboro.
 - Hal ini karena QR Code aplikasi Peduli Lindungi tak kunjung didapat.
 - Sultan juga meminta pemerintah pusat mengizinkan Pemerintah DIY menerbitkan QR Code sendiri.
 - Sejalan ini penggunaan aplikasi ini pun masih minim di kalangan pelaku usaha.

pengoperasiannya sudah diujicobakan sepanjang akhir pekan lalu. Saat ini, dirinya pun masih menunggu hasil evaluasi dari pihak Disbud.

"Sekarang dikelola Dinas Kebudayaan itu. Terutama, untuk monitoring waktu kunjungan dua jam, dan parkir tiga jam. Hasilnya seperti apa, saya belum dapat laporan. Tapi, kita sudah diujicobakan akhir pekan lalu," ujarnya.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta pemerintah pusat mengizinkan Pemerintah DIY berwenang menerbitkan QR Code aplikasi Peduli Lindungi.

Hal itu disebabkan karena Kemenkes dinilai lambat menerbitkan QR Code yang diajukan pengusaha maupun organisasi perangkat daerah (OPD).

Lambatnya penerbitan QR Code ini ditengarai karena Kemenkes harus melayani

permintaannya dari seluruh Indonesia. Seperti diketahui, sejak tanggal 14 September 2021 lalu, sejumlah tempat usaha seperti supermarket dan pusat perbelanjaan diminta untuk mengaplikasikan Peduli Lindungi.

Untuk dapat mengadopsinya, masing-masing pelaku usaha harus memiliki QR Code yang nantinya akan dipindai oleh pengunjung. "Kita selalu minta itu. Bagaimana QR Code itu tidak terlalu lama. Karena memang ya izin itu memang banyak dari seluruh Indonesia. Tapi bagaimana caranya agar jumlah yang banyak itu bisa (segera dikirim). (Caranya dengan memberi sebagian wewenang pada gubernur atau gimana supaya bisa cepat," terang Sri Sultan di Kompleks Kepatihan, Rabu (29/9).

Belum lama ini, Sri Sultan mengaku telah berkomunikasi dengan pemerintah pusat secara daring terkait masalah itu. Dalam kesempatan tersebut, Raja Keraton Yogyakarta ini meminta agar pengajuan QR Code untuk 75 perusahaan ekspor di DIY dapat dipercepat sehingga perusahaan dapat segera beroperasi penuh dengan mempekerjakan 100 persen pegawainya.

Sri Sultan khawatir lambatnya pengiriman QR Code berdampak pada produksi perusahaan ekspor di DIY. Terlebih pertumbuhan ekonomi DIY masih berada di angka positif.

"Karena ekspor Jogja ini lagi naik. Kita mengajukan sudah 75 untuk mendapat code tapi baru bertahap mendapatkan. Saya takut kalau momentumnya lepas," jelas Sri Sultan.

Masih minim
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP DIY), Noviar Rahmad, menjelaskan, berdasarkan amaturannya, penerapan Peduli Lindungi di DIY masih tergolong minim. Dari 91 tempat usaha yang dilakukan pemeriksaan, baru 16 saja yang telah mengadopsi Peduli Lindungi.

"Sebagian memang sudah mengajukan tapi proses pengajuan kementerian turunya lambat. Ada yang 2-3 minggu itu belum turun," terang Noviar.

Kendati demikian, ada juga tempat usaha yang sama sekali tak mengetahui kebijakan penerapan Peduli Lindungi. Maka, pihaknya pun akan terus melakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi tersebut. (aka/bda)

Sekarang kita lihat, sudah banyak orang datang ke sana. Jadi, mau tidak mau ya, kita harus memonitor, meski dengan aplikasi sendiri.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005